

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Endah Pravita Putri Aldia Pratama¹, Aghniya Choirunnisa², Zahra Septina³, Marina Ery Setiyawati⁴

Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3,4}

2010713020@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2010713027@mahasiswa.upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Kemiskinan menjadi suatu masalah yang kompleks dan harus segera diatasi. Berbagai upaya telah dirancang dan direalisasikan oleh pihak pemerintah demi menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya dengan membentuk lembaga keuangan yang berlandas pada prinsip Islami atau biasa dikenal sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Untuk Mewujudkan SDGs Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*systematic review*) dengan *search engine* yang digunakan dalam penelusuran literatur diantaranya adalah Google Scholar dan Garuda dengan kata kunci Lembaga Keuangan Syariah, Pengentasan Kemiskinan, SDGs. Artikel yang dihasilkan dipilih berdasarkan publikasi yang diterbitkan antara tahun 2018 sampai 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam LKS terdapat instrumen yang dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yaitu melalui penyaluran zakat, memanfaatkan sektor asuransi, dan pengembangan modal sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dari SDGs. Lembaga Keuangan syariah mempunyai peran yaitu membantu masyarakat kurang mampu dengan diadakannya program penyaluran zakat, memanfaatkan sektor asuransi, meningkatkan pendapatan dan usaha masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan seperti melalui pendanaan UMKM, serta dapat menyalurkan berbagai pendanaan kebutuhan sehingga dapat bernilai positif bagi perbaikan ekonomi di masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Pengentasan Kemiskinan, SDGs

ABSTRACT

Poverty is a complex problem and must be addressed immediately. Various efforts have been designed and implemented by the government to reduce poverty in Indonesia. One of them is by establishing a financial institution based on Islamic principles, commonly known as a Sharia Financial Institution (LKS). The purpose of this study is to determine the role of Islamic financial institutions in alleviating poverty and realizing the SDGs in Indonesia. This study uses a literature study method (*systematic review*) with search engines used in literature searches, including Google Scholar and Garuda, with the keywords Islamic Financial Institutions, Poverty Alleviation, and SDGs. The articles produced were selected based on publications published between 2018 and 2022. The results showed that in the LKS there were instruments that could help solve the problem of poverty, namely through the distribution of zakat, utilizing the insurance sector and capital development as an effort to alleviate poverty. The conclusions of this study indicate that Islamic financial institutions can assist in poverty alleviation in accordance with the objectives of the SDGs. Islamic financial institutions have a role, namely helping the underprivileged by holding zakat distribution programs, utilizing the insurance sector, increasing people's income and businesses to bring prosperity, such as through MSME funding, and being able to channel various funding needs so that they can be of positive value for economic improvement in the community as an effort In poverty alleviation in Indonesia.

Keywords : Poverty Alleviation, SDGs, Sharia Financial Institutions

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah makroekonomi yang menjadi perhatian semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan menjadi suatu masalah yang kompleks dan harus segera diatasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang fokus untuk mengatasi kemiskinan dengan mengkombinasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dilihat pada data Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan pada periode September 2020. Persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10.19%, meningkat hingga 0,41% jika dibandingkan dengan data pada bulan Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin per September 2020 yaitu sebesar 27,55 juta orang dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,13 juta orang terhadap data Maret 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengejutkan dunia.

Krisis ekonomi di Indonesia memang sudah terjadi sebelum adanya wabah COVID-19, namun diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Menyebar luasnya virus COVID-19 di Indonesia tidak hanya membawa dampak negatif bagi kesehatan akan tetapi mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan termasuk aspek perekonomian. Di Indonesia sendiri melakukan tindakan *lockdown* untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Indonesia telah melakukan berbagai macam cara untuk melakukan antisipasi meningkatnya penyebaran COVID-19 dengan memberlakukan PSBB bagi masyarakat yaitu

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *Physical Distancing*. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah seperti sekolah, bekerja maupun beribadah sekalipun. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Bank Dunia dampak ekonomi dari COVID-19 ini juga menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Di bawah perencanaan terburuknya, diperkirakan juga hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, melalui sejumlah skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan. (Iskandar, Possumah and Aqbar, 2020).

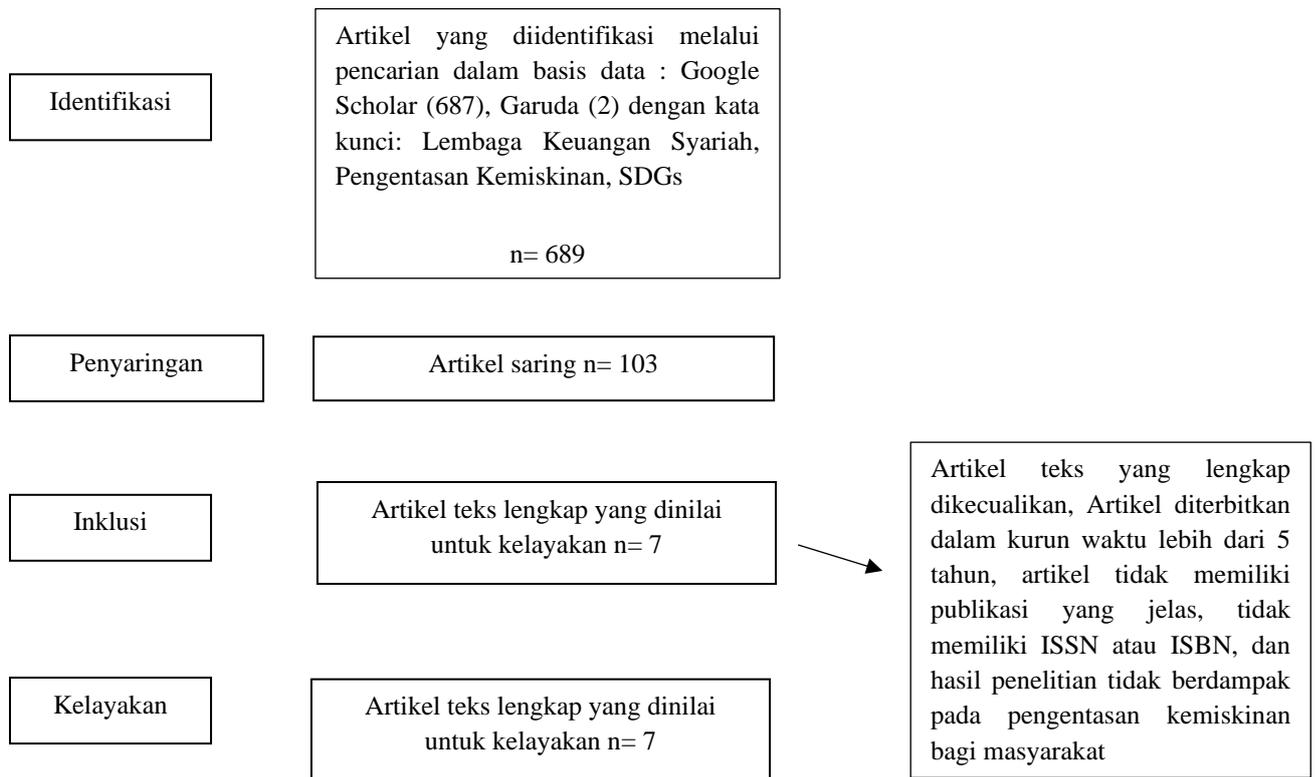
Berbagai upaya telah dirancang dan direalisasikan oleh pihak pemerintah demi menekan angka kemiskinan di Indonesia, dalam SDGs juga dinyatakan *no poverty* atau tanpa kemiskinan sebagai prioritas utama untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk suatu Lembaga Keuangan Syariah. Dimana Lembaga Keuangan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pada hal ini lembaga keuangan syariah diperlukan untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan uang. Lembaga Keuangan Syariah masyarakat dapat membantu mengatur sistem perekonomian dalam bidang industri maupun perdagangan yang berprinsip pada konsep moral dan ketuhanan dan bersandar pada ajaran halal, baik, jujur, amanah, saling mencintai dan persaudaraan. Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mewujudkan tujuan SDGs yaitu upaya pengentasan kemiskinan melalui peran dari Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dan perlu diadakannya upaya yang lebih mumpuni dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dimana peneliti mencari, mengumpulkan data, menggabungkan hal-hal yang esensial dan menganalisis fakta dari beberapa sumber ilmiah yang valid dan akurat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari metode inklusi didapatkan 7 sumber literatur yakni artikel ilmiah yang sudah dinilai kelayakannya. Strategi pencarian kepustakaan pada penelitian ini dengan menggunakan situs *online* melalui Google Scholar dan Garuda. Kata kunci pada penelitian ini meliputi:

Lembaga Keuangan Syariah, Pengentasan Kemiskinan, SDGs. Artikel yang diperoleh kemudian disaring kembali menurut tahun diterbitkannya yaitu antara tahun 2018 sampai 2022 atau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Artikel tersebut tentunya tersedia dengan teks yang lengkap, berdasarkan dengan relevansi, *open access*, dan mempunyai *International Standard Serial Number* (ISSN). Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah mengenai Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Di Indonesia. Sedangkan kriteria eksklusi dari penelitian ini meliputi : artikel tidak memiliki teks yang lengkap artikel diterbitkan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun, artikel bersumber dari publikasi yang tidak jelas, tidak *open access*, tidak memiliki nomor ISSN.

Penulis menggunakan metode kajian sistematik PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Review*) yang meliputi identifikasi, penyaringan, inklusi dan kelayakan berdasarkan temuan artikel yang kemudian dianalisis. Artikel yang sesuai kriteria akan dikaji untuk mendapatkan data terkait peran Lembaga Keuangan Syariah yang berdampak dalam pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan SDGs Di Indonesia. Seluruh temuan mengenai pelaksanaan *telemedicine* akan didata dan disajikan beserta penjelasan secara naratif.



Skema 1. Diagram Alur Proses Seleksi dan Pemilihan Artikel

HASIL

Berdasarkan hasil tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Keuangan Syariah terdapat instrumen yang dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan yaitu melalui penyaluran zakat, memanfaatkan sektor asuransi, meningkatkan pendapatan dan usaha masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan seperti melalui pendanaan UMKM, serta dapat

menyalurkan berbagai pendanaan kebutuhan sehingga dapat bernilai positif bagi perbaikan ekonomi di masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Tabel 1. Penjelasan Jurnal Analisis Peran lembaga keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan *sustainable development goals*

No	Penulis/Tahun	Tempat	Judul	Metode	Hasil
1.	Awwalunnisa, (2021)	N. Indonesia	Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Analisis Deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dari lembaga keuangan islam untuk upaya pengentasan kemiskinan di NTB adalah dengan upaya bantuan dari zakat.
2.	Studi, P. et al. (2022)	Indonesia	Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Di Indonesia	<i>Mixed Method</i> (kualitatif-kuantitatif)	menunjukkan bahwa peran ekonomi syariah dalam pengentasan kemiskinan dapat memanfaatkan sektor asuransi dalam pencapaian target-target SDGs.
3.	Nuringsih, (2019)	Indonesia	Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Metode Kualitatif (teknik deskriptif)	Hasil penelitian menunjukkan peran lembaga keuangan syariah dalam pencapaian SDGs meningkatkan pendapatan dan usaha masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan, melalui akses keuangan.
4.	Katman dan Firawati, (2021)	Indonesia	Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah banyaknya upaya yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam mengimplement

					inklusif bagi pelaku Ekonomi masyarakat.
5.	Laili, N. Y. and Kusumaningtias, R. (2020)	Indonesia	Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)	Metode Kualitatif (teknik pendekatan fenomenologi)	Hasil penelitian ini menunjukkan Inklusi Keuangan sangat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas UMKM. Kontribusi yang disalurkan bergantung pada jenis dan kebutuhan usahanya.
6.	Hafidz Jefik Zulfikar. (2021)	Indonesia	Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19	Metode Deskriptif (teknik kualitatif)	Hasil penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri memiliki peranan penting bagi pemerintah dalam sistem perekonomian di Indonesia pada masa Covid-19 dengan menyalurkan berbagai pendanaan kebutuhan sehingga dapat bernilai positif bagi perbaikan ekonomi di masyarakat.
7.	Paramita dan Zulkarnain (2018)	Indonesia	Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Metode Kualitatif (teknik deskriptif analitis)	Hasil penelitian ini dimana ditemukan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan modal usaha kepada usaha memiliki peran yang penting dalam meningkatkan mikro kecil dan menengah serta perekonomian negara.

PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan merupakan semua badan yang kegiatannya pada bidang keuangan, yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi, dimana biasanya kegiatan pada lembaga keuangan berfokus diperuntukkan untuk investasi perusahaan, kegiatan distribusi barang dan jasa, serta kegiatan konsumsi. Lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah yang memiliki perbedaan pada tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup juga tanggung jawab.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan usaha di bidang keuangan dengan menerapkan dasar prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga Keuangan Syariah diawasi oleh dewan pengawasan syariah (DSN), yang mana Lembaga keuangan memiliki 2 peran penting yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal) sehingga produk-produk yang dihasilkan seperti deposito, gadai dan lain-lainya. Secara umum Lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu bank dan non bank, yang mana perbedaan keduanya dapat dilihat dari kegiatan utamanya, namun keduanya memiliki peran yang penting bagi perekonomian nasional

Lembaga keuangan syariah yang salah satu kegiatannya yaitu berusaha untuk menyalurkan dana surplus kepada pihak yang mengalami defisit dana (Arif, 2012), sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi upaya dalam mengentaskan kemiskinan dengan kegiatan zakat, selain itu dalam mencapai target tersebut juga produk-produk Lembaga keuangan seperti asuransi dan lain-lainnya, yang memiliki nilai positif dalam membantu perekonomian di Indonesia. Misalnya pada kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan pemasukan perekonomian negara yang berdampak buruk pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan pengelolaan keuangan yang diterapkan pada Lembaga keuangan syariah yang mana memegang prinsip islami dalam membantu perekonomian dan kesejahteraan.

Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan situasi yang dipandang dimana seseorang tidak dapat atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan layak, dimana tingkat ekonomi dan sosial dalam hal ini menentukan garis nasib seseorang dengan pendapatan maupun pengeluaran yang kurang dapat dikategorikan miskin (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Penurunan tingkat perekonomian masih menjadi penyebab naiknya tingkat kemiskinan di Indonesia, kemudian tingkat produktivitas masyarakat pun mempengaruhi pendapatan yang diperoleh sehingga menyebabkan ketidakefektifan bagi peningkatan perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini dibutuhkan keuangan inklusif yang merupakan indikator penting yang berorientasi terhadap keadilan dan pemerataan, dimana dalam pandangan islam hal ini wajib dilakukan dengan pemerataan ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan pendapatan serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Cara ini dapat diterapkan dengan memanfaatkan produk jasa keuangan.

Lembaga keuangan syariah berperan dalam membantu perekonomian masyarakat serta membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan fungsi serta manfaat Lembaga keuangan syariah seperti kemudahan transaksi, menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan agenda keuangan, selain itu penerapan sistem non bunga serta prinsip dan kerja operasionalnya yang terintegrasi dengan nilai sosial dan nilai ekonomi, dimana hal ini dapat tercipta dengan dilakukannya perluasan akses usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dengan pemberian modal selain itu juga produk dari Lembaga keuangan syariah yang disediakan dimana menerapkan bagi hasil yang sesuai dengan ajaran islam yaitu pembiayaan mudharabah, yang mana pada dasarnya kegiatan pembiayaan ini bersifat produktif dengan menginvestasikan modal untuk kepada UMKM yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil, serta meningkatkan pendapatan juga membantu mengurangi populasi penduduk miskin dan mengurangi angka pengangguran akibat terbukanya peluang kerja baru.

Namun terdapatnya keterbatasan Lembaga keuangan syariah serta kesadaran masyarakat terhadap Lembaga keuangan syariah yang masih rendah dan lebih tertarik sehingga lebih banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan transaksi dengan Lembaga keuangan konvensional, hal ini dikarenakan asumsi masyarakat terhadap sistem Lembaga keuangan

syariah yang terkesan sulit dan ribet sehingga tidak banyak menarik atensi masyarakat, padahal jika dilihat dari perkembangan ekonomi di Indonesia terutama bagi pelaku -pelaku usaha mikro, Lembaga keuangan syariah ini membantu sehingga sangat dibutuhkan peran dari Lembaga keuangan syariah dalam memperluas pasar sehingga dapat meningkatkan kontribusi besar pada perekonomian negara, hal ini merupakan cara yang disediakan oleh Lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mensejahterakan juga sebagai bentuk upaya pemberantasan kemiskinan.

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan lembaga keuangan komersial, hal ini karena lembaga keuangan syariah membentuk konsep muamalah yang mana dalam ekonomi islam ditujukan untuk mensejahterakan seluruh umat manusia, serta menciptakan keadilan dengan pencapaian falah, yang mana hal ini sejalan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan program pembangunan yang berkelanjutan yang disepakati untuk mendorong adanya pembangunan baru dalam upaya mendorong adanya perubahan kearah pembangunan berkelanjutan yang mana didasarkan oleh hak asasi manusia dan kesetaraan dalam membangun pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola, dengan dibentuk 17 tujuan dan 169 target yang salah satunya, tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Peran Lembaga keuangan Syariah yang kaitanya dengan SDGs terutama pada pembangunan sektor ekonomi di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan perlu diupayakan dari berbagai program dalam mewujudkan tujuan SDGs di tahun 2030, dimana dalam kesepakatannya Indonesia meringkas dalam sebuah peraturan yang dibentuk pada “Peraturan Presiden No.59 tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan”. Dengan begitu pemerintah melansir program peningkatan kesejahteraan dengan memberdayakan perekonomian berbasis masjid. Ekonomi berbasis masjid ini sangat memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya, pemanfaatan masjid sebagai media sekaligus tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dapat menjadi penopang sektor ekonomi yang merata di kalangan masyarakat. Walaupun inovasi ini masih terdengar baru namun keefektifannya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat saat ini sudah teruji dengan baik. Dilansir sejak tahun 1400 M islam pernah mengalami kejayaan dalam menggunakan beberapa program dalam lembaga keuangannya seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta pengelolaan perpajakan (Jizyah). (Mustofa, Imron. 2021)

KESIMPULAN

Hasil dari *systematic review* dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dari SDGs. Lembaga Keuangan syariah mempunyai peran yaitu membantu masyarakat kurang mampu dengan diadakannya program penyaluran zakat, memanfaatkan sektor asuransi, meningkatkan pendapatan dan usaha masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraan seperti melalui pendanaan UMKM, serta dapat menyalurkan berbagai pendanaan kebutuhan sehingga dapat bernilai positif bagi perbaikan ekonomi di masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana UPN Veteran Jakarta, Bapak Arga Buntara, S.KM., MPH. yang

telah memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa artikel ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan. Semoga artikel ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua yang membutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. A. (2020). Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan : Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial. *Jurnak UNJ*, 2020, 49–59.
- Ahmad, R. A., Ahmad, H. F., & Gontor, U. D. (2021). *The role of Islamic microfinance towards SDGs 2030 from poverty alleviation*. 7(2), 150–160.
- Apriani, T. (2021). the Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Achieve *Sustainable Development Goals* (Case Study of Bmt Bangun Rakyat Sejahtera). *Jurnal Ekonomi Balance*, 17(1), 31–41. <https://doi.org/10.26618/jeb.v17i2.6480>
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283>
- Irwan Suriadi, Hailudin, & Siti Sriningsih. (2021). Model Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengurai Kemiskinan Di Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*, 7(1), 82–105. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i1.70>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Iswandi, H., Fatmawati, F., & ... (2021). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Selama Pandemi Covid-19. *Dirasat Islamiah: Jurnal ...*, 2, 139–152.
- Katman, M. N., & Firawati. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat. *Ekonomi Islam*, 1(I), 26–41.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *METADATA INDIKATOR PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Nuringsih, T. (2019). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dengan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) *Bprs, bmt*, 3, 159–174.
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>
- Rakhmat, A. S., & Busaid, B. (2022). Kritik Terhadap Konsep Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics). *Jesya*, 5(2), 1621–1629. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.770>
- Studi, P., Syariah, E., Ekonomi, F., & Islam, I. A. (2022). *PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI INDONESIA mewujudkan diri sebagai negara maju dan bersanding dengan negara Adikuasa banyak tujuan diantaranya pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan. 110–121.*
- SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGs)*. Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. <https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Metadata-Pilar-Sosial-Edisi-II.pdf>.